



## Kesejahteraan Masyarakat Jakarta 1969-1997

### *Welfare of the People of Jakarta 1969-1997*

Winario<sup>1✉</sup>, Abrar<sup>2</sup>, Sri Martini<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>✉ Universitas Negeri Jakarta

E-mail: winario93@gmail.com✉, abrar@unj.ac.id, srimartini7271@gmail.com

Diterima: 19 Juni 2023 | Direvisi: 12 Maret 2024 | Diterbitkan: 25 Maret 2024

#### ARTICLE INFO

#### ABSTRACT

##### Keywords:

Jakarta,  
History,  
Welfare.

*The welfare of the people of Jakarta during the period of governor Ali Sadikin to Surjadi Soedirdja showed certain developments. This study aims to determine the welfare development of the DKI Jakarta government during the tenure of Ali Sadikin to Surjadi Soedirdja's term. This study uses the historical method which consists of 5 stages including topic selection, source gathering (heuristics), source criticism (verification), interpretation (interpretation), and writing (historiography). The findings of the researchers are aimed at increasing the welfare of Jakarta in various fields. The health sector has increased, especially the availability of 99 hospitals and the development of 442 health centers, the availability of 15,227 treatment rooms. And the female population who use contraception is 317,896 out of the female population of 3,694,971. The Education Sector has had development results with many school buildings having been built as many as 6,924 schools as well as many educators 88,710 and students as many as 1,654,041. The development of the existing workforce in Jakarta is 3,646,285 and is dominated by working in labour-intensive fields. House construction in Jakarta has reached an area of 44,462.208 ha. Social security that the Provincial Government implements by guaranteeing that various welfare support facilities are properly available.*

##### Kata Kunci:

Jakarta,  
Sejarah,  
Kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat Jakarta periode gubernur Ali Sadikin hingga Surjadi Soedirdja memperlihatkan perkembangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan pemerintah DKI Jakarta pada masa jabatan Ali Sadikin hingga jabatan Surjadi Soedirdja. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 5 tahap diantaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan penulisan (historiografi). Temuan peneliti menunjukkan peningkatan kesejahteraan Jakarta dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan mengalami peningkatan terutama ketersediaan Rumah Sakit sebanyak 99 serta perkembangan Puskesmas sebanyak 442, ketersediaan ruang perawatan yang tersedia 15.227. Serta penduduk perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 317.896 dari penduduk perempuan sebanyak 3.694.971. Bidang Pendidikan memiliki hasil pembangunan dengan banyak gedung sekolah sudah di bangun sebanyak 6.924 sekolah serta banyak tenaga pendidik 88.710 dan peserta didik sebanyak 1.654.041. Perkembangan ketenakerjaan tenaga kerja yang ada di Jakarta sebanyak 3.646.285 dan didominasi berkerja dalam bidang padat karya. Pembangunan rumah di Jakarta mencapai luas 44.462,208 ha. Jaminan sosial yang Pemprov lakukan dengan menjamin berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan tersedia dengan baik.

## PENDAHULUAN

Jakarta merupakan kota di Indonesia yang terletak dipesisir utara pulau Jawa. Secara administratif kota Jakarta terletak pada  $94^{\circ}45'/94^{\circ}05'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}68'/11^{\circ}15'$  Lintang Selatan. Luas kota Jakarta pada tahun 1966 pemerintahan Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta adalah 577 km<sup>2</sup> (Karta Hadimadja, 1993). Kondisi ketinggian tanah Jakarta, bagian utara memiliki ketinggian yang lebih rendah dari permukaan laut, sedangkan kawasan selatan Jakarta berbentuk bukit-bukit. Sehingga kawasan Jakarta terlihat agak menurun ke arah laut.

Kondisi Jakarta dapat diklasifikasikan kawasan utara sebagai wilayah pelabuhan dan perikanan. Sedangkan kawasan timur sebagai wilayah industri dan selatan sebagai wilayah perkebunan (Hilman, 2008). Masyarakat Jakarta pada tahun 1966 memiliki komposisi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.639.465 dengan luas wilayah Jakarta 590,11 Km<sup>2</sup>. Peningkatan penduduk di Jakarta mengalami peningkatan dikarenakan faktor urbanisasi yang tinggi ke Jakarta, dan pertumbuhan penduduk yang didasari angka kelahiran yang tinggi.

Urbanisasi merupakan kegiatan perpindahan dari desa ke kota. Tujuan urbanisasi ini diharapkan kehidupan yang lebih baik dari desa, karena kehidupan di kota identik dengan memperbaiki kehidupan dari sisi ekonomi. Kenyataannya Jakarta belum siap dalam menerima banyak penduduk, hal ini disebabkan kondisi fasilitas Jakarta yang belum memadai (Edi, 1986). Keadaan Jakarta tahun 1966, secara ekonomi terjadinya inflasi yang tinggi memaksa masyarakat untuk hidup sesuai dengan kondisi yang ada. (Ricklefs, 2005).

Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya masyarakat yang berpindah ke Jakarta yang notabennya kota besar, untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

Berdasarkan situasi kependudukan di Jakarta, jumlah penduduk Jakarta bertambah pada tahun 1950-an akibat urbanisasi. Penduduk mencari pekerjaan, salah satu faktor ekonomi yang mendorong urbanisasi dan banyaknya pendatang yang tiba di Jakarta. Pendidikan juga menjadi alasan imigran datang ke Jakarta (Singarimbun, 1997).

Kehidupan di Jakarta pada tahun 1971 belum memiliki jaminan hidup sejahtera, masyarakat Jakarta sebagian besar bekerja sebagai tukang becak, industri kecil, dan sektor formal (padat modal), tetapi pekerjaan itu bersifat sementara (Jillinek, 1995). Pendapatan perkapita Jakarta di tahun 1971 sebesar Rp. 55.842,2, kondisi yang akan terus berkembang karena Pemprov DKI menjaga inflasi daerah agar tidak membuat sulit rakyatnya.

Kondisi kas Jakarta yang pada masa perpindahan (Mayrudin, 2018) kekuasaan Sudiro ke Ali Sadikin tersedak sebesar Rp. 18.000, dan anggaran yang ditetapkan Rp. 66.000.000. Saat Ali Sadikin menjadi Gubernur APBD Jakarta ditingkatkan menjadi Rp. 266.000.000 (Widyanigrum, 2013). APBD Jakarta selalu akan meningkat setiap tahunnya dikarenakan kondisi Jakarta yang menjadi kota yang besar akan selalu membutuhkan anggaran yang besar juga, hal ini akan selalu terlihat dari bagaimana program Jakarta yang selalu berorientasi membangun.

Penelitian tentang kesejahteraan sudah cukup banyak, seperti (Abrar et al., 2023) dan (Lukmansyah & Ahmad, 2016). Penelitian ini

berderda dengan sebelumnya karena fokus akan tentang perkembangan kesejahteraan Jakarta tahun 1969-1997.

Sebuah cara Pemprov untuk meningkatkan kesejahteraan Jakarta. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan 5 aspek tersebut membawa sebuah kawasan menjadi lebih sejahtera, selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Spiker yang berpendapat bahwa ada lima aspek utama seperti, kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial (Adi, 2018).

Berangkat dari kondisi di atas maka, peneliti tertarik dalam mengkaji bagaimana perkembangan kesejahteraan Jakarta tahun 1966-1997.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historis). Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah dibagi dalam 5 tahap pemilihan topik, tentunya melibatkan kedekatan emosional dan intelektual penulis. Pada tahap pengumpulan sumber (heuristik) tentunya terdapat sumber primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis. Dengan terkumpulnya sumber yang ditemukan tentunya di lanjutkan tahap kritik sumber (verifikasi), hal ini dilakukan untuk untuk mendapatkan fakta sejarah dari sebuah topik. Tahap interpretasi (penafsiran) merupakan hasil subjektifitas dalam seleksi bahan yang akan digunakan dalam penulisan. Pada tahap akhir penulisan (historiografi), merupakan cara penulis untuk menyatukan informasi yang memuat fakta. Dalam penelitian ini

menggunakan data berupa arsip Badan Pusat Statistik Jakarta, dan buku- buku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan kesejahteraan terlihat dari bagaimana kondisi masyarakat yang sudah tersentuh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov. Kualitas penduduk Jakarta memiliki kriteria ketersediaan lembaga pendidikan, banyaknya fasilitas kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, rumah untuk tinggal serta jaminan sosial. Peningkatan layanan pokok ke masyarakat tentunya akan berdampak besar bagi penduduk, hal ini karena kebutuhan utama masyarakat terpenuhi. Pemprov melakukan pembangunan ini tentunya dengan perhitungan dengan selalu meningkatnya penduduk Jakarta.

Pada awal tahun 1966 Penduduk Jakarta berjumlah 3.639.465, dalam kurun waktu 5 tahun penduduk Jakarta mengalami peningkatan menjadi 4.437.135. Pada tahun 1977 penduduk Jakarta memiliki penduduk sebanyak 5.245.765, dengan kepadatan penduduk 8.229/km<sup>2</sup>. Pada tahun 1982 penduduk Jakarta mengalami penambahan penduduk Jakarta menjadi 5.976.562, dengan kepadatan penduduk 8.997/km<sup>2</sup>. Pada tahun 1987 Jakarta memiliki penduduk pertumbuhna penduduk menjadi 6.760.910, dengan kepadatan penduduk 10.325/km<sup>2</sup>. Penduduk Jakarta pada tahun 1992 memiliki penduduk sebanyak 7.394.996 dengan kepadatana penduduk mencapai 11.217/km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk Jakarta tercatat pada akhir 1997 berjumlah 7.712.571, dengan kepadatan penduduk 11.657/ km<sup>2</sup>.

Kondisi Jakarta ini sejalan dengan pendapat Malthus, dalam hal ini ia melihat pertumbuhan penduduk dibatasi karena sumber daya alam sangat terbatas. Pertumbuhan penduduk Jakarta cocok dengan konsep Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin) (Conway, 2015). Hal yang dilakukan oleh Pemprov sendiri dengan melakukan alat kontrasepsi, dengan hal ini tentunya dapat mejaga laju pertumbuhan penduduk Jakarta.

Peningkatan penduduk Jakarta terlihat adanya perbedaan dari segi laju pertumbuhannya, hal ini disebabkan dengan kebijakan pemerintah dan mobilitas penduduk dari luar (Edi, 1986). Pengendalian penduduk di Jakarta dapat dikatakan berhasil, terutama dalam memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Hal yang lain dengan memberlakukan kebijakan “Kota Tertutup”, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penduduk luar Jakarta masuk ke Jakarta. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Pemprov yang berkesinambungan.

Penduduk Jakarta memperoleh keahlian untuk mendapatkan pekerjaan, dalam hal ini diberikan bekal melalui lembaga pendidikan yang ada. Lembaga pendidikan yang di bentuk oleh pemerintahan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, serta Universitas dan Akademi. Hal ini kunci dalam peningkatan kesejahteraan dalam sebuah wilayah.

Mensejahterakan sebuah wilayah tentunya ditopang dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersedia, hal ini diberikan untuk memepermudah masyarakat

untuk berobat. Walaupun fasilitasnya tersedia tentunya diikuti dengan perkembangan dokter dan ketersediaan ruangan perawatan. Perumahan serta jaminan sosial sebuah cara Pemprov untuk melindungi warganya dari kemiskinan struktural.

#### **A. Bidang Kesehatan**

Pembangunan Kesehatan penting bagi penduduk Jakarta karena dengan membangun fasilitas dapat meningkatkan kesadaran akan hidup sehat. Tentunya pembangunan ini beriringan dengan tenaga kesehatan yang dapat membantu berjalannya kesehatan Jakarta. Fasilitas yang dibangun dimulai dengan Puskesmas yang merupakan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dengan kata lain fasilitas yang terdekat dekat dengan masyarakat. Rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap dari Puskesmas.

Bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1966-1997 memfokuskan bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat, membangun Rumah Sakit serta Puskesmas salah satu cara mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan. Hal ini ketersediaan infrastruktur mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga infrastruktur harus dipahami sebagai dasar kebijakan. Berdasarkan teori kebutuhan (*needs*) karya Maslow dalam bidang kesehatan berpendapat bahwa kebutuhan yang dirasakan hanya secara individu (Pohan & Halim, 2016). Sehingga masyarakat akan

dengan sendirinya menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh karena itu Pemprov membangun banyak fasilitas kesehatan.

Pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan untuk menampung masyarakat Jakarta penduduk. Rumah Sakit merupakan sebuah badan penyelenggara layanan kesehatan untuk masyarakat, kondisi Rumah Sakit terdapat di Jakarta pada tahun 1966 sebanyak 22 buah, serta banyak ruang perawatan sebanyak 4.226 ruangan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemprov, pada tahun 1970 Rumah Sakit yang telah dibangun sebanyak 38 dan ketersediaan ruangan perawatan berjumlah 5.614. Pada tahun 1977 Rumah Sakit di Jakarta bertambah menjadi 41 Rumah Sakit serta banyaknya ruang perawatan yang tersedia sebanyak 7.627. Pada tahun 1982 fasilitas Rumah Sakit Jakarta tentunya mengalami bertambah menjadi 45 buah dan ketersediaannya ruangan perawatan sebanyak 9.356. Pada tahun 1987 sudah memiliki Rumah sakit sebanyak 64 Rumah Sakit dengan ketersediaan ruang perawatan sebanyak 12.128. Rumah Sakit yang dimiliki Jakarta tahun 1992 mencapai 89 buah dengan ketersediaan ruang perawatan sebanyak 14.583. Pada tahun 1997 Rumah Sakit Jakarta yang telah dibangun oleh Pemprov sebanyak 99 dengan ketersediaan ruangan perawatan sebanyak 15.227.

Fasilitas kesehatan yang dibangun bukan hanya Rumah Sakit, Puskesmas dibangun untuk sebagai penunjang kesehatan masyarakat yang terdekat dengan

masyarakat. Perkembangan Puskesmas sendiri lebih pesat dibandingkan dengan Rumah Sakit, hal ini bisa dilakukan agar dapat memberikan pelayanan pertama kepada masyarakat. Pada tahun 1969 Pemprov memiliki Puskesmas kecamatan ataupun kelurahan sebanyak 27 buah. Pada tahun 1970 Pemprov berhasil menambah banyaknya Puskesmas menjadi 43 buah, pada tahun 1977 banyak Puskesmas Jakarta mencapai 247 buah. Pada tahun 1982 pemprov sudah memiliki 321 Puskesmas, dan di tahun 1987 berkembang menjadi 358. Pada tahun 1992 Jakarta memiliki Puskesmas sebanyak 416 dan tahun 1997 Jakarta sudah memiliki 442 Puskesmas. Hal ini Pemprov ingin memberikan fasilitas kesehatan yang terdekat kepada masyarakatnya.

Fasilitas yang sudah dibangun tentunya dibutuhkan tenaga kesehatan yang mempunyai untuk melengkapi sistem kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dan bidan. Jakarta memiliki tenaga kesehatan sebanyak 1.546 orang pada tahun 1966, ditahun 1970 bertambah menjadi 3.138. Pada tahun 1977 penduduk Jakarta yang berprofesi menjadi tenaga kesehatan sebanyak 4.374, dan tahun 1982 mengalami peningkatan 6.306 tenaga kesehatan. Pada tahun 1987 tenaga kesehatan yang ada di Jakarta sebanyak 28.849, dan pada tahun 1992 bertambah menjadi 28.638. Pada akhir tahun 1997 penduduk Jakarta yang bekerja sebagai 25.225. Tentunya hal ini menjadi standarisasi dari WHO (*World Health Organization*) dalam sebuah wilayah

tersedianya dokter dengan perbandingan 1:1.000 penduduk. Peningkatan tenaga kesehatan dilakukan dengan cara membuka lembaga pendidikan yang berbasis kesehatan.

Dalam hal ini melihat perkembangan tenaga kesehatan tentunya berdampak pada pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan pelayanan yang baik. Levey Loomba (1973) (dalam Puji Ramdani, 2009) dalam menjelaskan pelayanan kesehatan sebuah upaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan masyarakat. Melihat kondisi Jakarta yang selalu mengalami pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan akan pelayanan akan terus meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan Jakarta terlihat dimana dengan banyak lembaga pendidikan yang membuka jurusan kesehatan, sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan akan terpenuhi.

Bidang kesehatan berperan penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk tentunya, dengan dikenalkannya sistem Keluarga Berencana yang dimana untuk menekan angka kelahiran (Natalitas) yang tinggi. Kebijakan ini menasar pada perempuan yang nantinya akan diberikan obat atau alat sesuai dengan keinginan sang ibu. Hal ini bisa terlihat bagaimana perkembangan penduduk Jakarta dibawah 5%, tentunya berkat kampanye yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penyebaran untuk memakai alat kontrasepsi.

Pendudukan perempuan pada tahun 1971 sebanyak 2.259.530 dan banyak penduduk menggunakan alat kontrasepsi dari berbagai jenis sebanyak 33.922. Pada tahun 1977 masyarakat yang bertambah menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 131.106, sedangkan penduduk perempuan yang berada di Jakarta sebanyak 2.599.801. Pada tahun 1982 penduduk perempuan Jakarta mencapai 2.877.040, dengan banyak penambahan pengguna alat kontrasepsi sebanyak 742.139. Pengguna alat kontrasepsi pada tahun 1987 tentunya mengalami peningkatan sebanyak 445.082 dari penduduk perempuan sebanyak 3.249.032. Penduduk perempuan Jakarta di tahun 1992 sebanyak 3.491.089, penambahan penduduk perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 255.024. Pada akhir 1997 penduduk Jakarta yang menggunakan kontrasepsi sebanyak 317.896 dari banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.694.971.

## **B. Bidang Pendidikan**

Bidang pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk menuju sejahtera, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi buta huruf. Dengan pendidikan dapat membuat masyarakat memperoleh pekerjaan, penyedia pekerjaan tentunya melihat pendidikan yang telah diselesaikan dan menyesuaikan kebutuhan. Pemprov untuk mencapai pendidikan untuk seluruh masyarakat tentunya membentuk banyak fasilitas sekolah tentunya akan mencetak lulusan yang berkualitas. Pendidikan Jakarta dimulai dari Taman kanak-kanak yang dilanjutkan ke

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Universitas/Akademik.

Tentunya kebutuhan pendidikan akan terus meningkat setiap tahunnya, dengan banyaknya peserta didik, tentunya dibangun fasilitas pendidikan yaitu bangunan sekolah. Perkembangan banyak sekolah Jakarta pada tahun 1966 tersedia sebanyak 1.557 sekolah dan berhasil berkembang hingga pada tahun 1970 sebanyak 2.091 sekolah. Pembangunan sekolah oleh Pemprov DKI telah menghasilkan 4.046 sekolah pada tahun 1977. Pada tahun 1982 banyak sekolah yang dimiliki Jakarta sebanyak 5.509 sekolah, dan pada 1987 sekolah yang berhasil dibangun oleh Pemprov Jakarta sebanyak 7.108. Pada tahun 1992 sekolah yang dibangun oleh Pemprov Jakarta sebanyak 7.851, dan pada tahun 1997 sekolah yang telah berhasil dibangun oleh Pemprov sebanyak 6.924. Pembangunan sekolah yang telah dilakukan oleh Pemprov untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar selama 6 tahun, pada tahun 1984 pemerintah meningkatkan wajib belajar menjadi 9 tahun. Hal ini diharapkan penduduk Jakarta meningkat kesejahteraannya.

Menurut Popi Sopiadin (2010) (dalam Jeklin, 2016), fasilitas yang harus tersedia untuk melancarkan sistem pendidikan berupa gedung sekolah dan kelengkapan ruang belajar. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang memuaskan. Dengan melihat perkembangan sekolah di Jakarta mengalami peningkatan setiap

tahunnya, pembangunan yang dilakukan Pemprov berdampak positif bagi pendidikan Jakarta. Banyaknya penduduk Jakarta yang mengikuti pendidikan tentunya juga akan bertambah dengan seiring fasilitas yang sudah memadai.

Sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan, tentunya didukung dengan tenaga pendidik (guru) yang memberikan pengetahuan kepada siswa. Guru sebagai penyampai informasi yang telah pernah dia dapatkan saat menempuh pendidikan. Guru Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Jakarta memiliki tenaga pendidik di tahun 1966 sebanyak 10.785, peningkatan tenaga pendidik pada tahun 1970 menjadi sebanyak 21.965. Pada tahun 1977 Jakarta memiliki tenaga pendidik sebanyak 53.145. Tenaga pendidik mengalami perkembangan seiring bertambahnya fasilitas pendidikan, hal ini terlihat pada tahun 1982 tenaga pendidik Jakarta mencapai 61.614. Profesi penduduk Jakarta pada tahun 1987 sebagai tenaga pendidik mencapai 81.511. Pada tahun 1992 tenaga pendidik Jakarta telah mencapai 89.423, dan pada tahun 1997 tenaga pendidik yang mengajar disekolah Jakarta sebanyak 88.710.

Penduduk dalam kriteria usia anak sebanyak 1.189.062 penduduk yang berusia dari 5-14 tahun, pada tahun 1971 penduduk yang mengikuti program pendidikan dari semua jenjang sebanyak 832.110. Pada tahun 1977 penduduk Jakarta yang termasuk usia belajar mencapai 1.407.438, dan

penduduk Jakarta yang mengikuti pendidikan sebanyak 1.191.701. Pada tahun 1982 penduduk yang dalam usia belajar sebanyak 1.601.021, banyaknya siswa yang bersekolah 1.640.528. Perkembangan peserta didik tahun 1987 sebanyak 1.891.444 dan banyak penduduk Jakarta yang masuk dalam usia belajar sebanyak 1.864.786, ditahun 1992 banyaknya peserta didik sebanyak 2.037.482 dengan banyaknya penduduk Jakarta dalam usia belajar sebanyak 1.817.800 Pada akhir tahun 1997 Penduduk Jakarta yang bersekolah berjumlah 1.654.041, banyak penduduk yang masuk dalam usia belajar sebanyak 1.679.800.

Pertambahan peserta didik tentunya dampak dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang sudah memadai, serta tenaga pendidik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini memperlihatkan Pemprov DKI serius dalam penumpasan buta huruf di Jakarta, dengan menambah fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik. Fasilitas yang di bangun tentunya didasarkan dengan kebutuhan pendidikan, karena dengan adanya wajib belajar yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk bersekolah. Kebijakan ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dari sisi pendidikan yang dimana penduduk Jakarta menjadi terbebas dari buta huruf.

### C. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan memiliki kriteria seseorang yang memiliki usia 14 tahun yang disebut sebagai angkatan kerja, penduduk

Jakarta pada tahun 1971 memiliki angkatan kerja sebanyak 1.272.627, penduduk Jakarta sebagian besar bekerja dalam bidang kemasyarakatan, perdagangan, dan industri serta pekerjaan lainnya. Secara jenis kelamin yang sudah memiliki pekerjaan dengan komposisinya laki-laki sebanyak 964.936 dan perempuan sebanyak 267.691. Angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan sebanyak 71.599, komposisi penduduk yang belum memiliki pekerjaan dengan banyaknya penduduk perempuan yang belum bekerja sebanyak 13.380 dan laki-laki 58.129.

Penduduk Jakarta pada tahun 1977 memiliki angkatan kerja sebanyak 3.698.264, dengan komposisi penduduk yang mencari pekerjaan menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 43.894 dan perempuan sebanyak 9.103. Banyak penduduk yang mencari kerja sebanyak 41.097 belum memiliki pengalaman dalam bekerja. Pada tahun 1982 penduduk Jakarta memiliki angkatan kerja sebanyak 3.442.847 dengan komposisi penduduk sebanyak perempuan sebanyak 1.706.928 dan laki-laki 1.724.086. Pada tahun 1987 penduduk Jakarta memiliki jumlah penduduk dengan sebanyak 6.760.910 dengan banyak pencari pekerja sebanyak 132.073 penduduk. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang mencari pekerjaan sebanyak 87.431 dan perempuan 44.642. Dengan banyaknya angkatan kerja Jakarta pada tahun 1987 sebanyak 2.297.096.

Pada tahun 1992 penduduk Jakarta memiliki perkerjaan sebanyak 3.126.225 , sedangkan yang tidak bekerja berjumlah 393.245. Perkembangan ketenagakerjaan pada tahun 1997, memiliki angkatan kerja



sebanyak 3.833.779, penduduk Jakarta yang memiliki pekerjaan sebanyak 3.646.285 dan penduduk Jakarta yang belum memiliki pekerjaan sebanyak 402.754. Pendidikan yang terbanyak dalam mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, sedangkan penduduk Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaannya berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Melihat kondisi yang ketenagakerjaan Jakarta memiliki korelasi yang baik dengan teori Adam Smith (1776), pekerja hanya sebagai faktor produksi utama yang nantinya akan menentukan kesejahterannya sendiri (Santos, 2016). Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik harus dilakukan pembagian kerja yang efektif. Kondisi Jakarta yang memiliki banyak penduduk akan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan banyaknya penduduk Jakarta yang sudah bekerja serta memiliki pendidikan yang cukup.

#### **D. Bidang Pemukiman**

Pemukiman Jakarta dengan banyaknya penduduk tentunya akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Sehingga Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan ini membangun rumah bersusun. Hal ini dilakukan karena tanah di Jakarta bersifat terbatas sedangkan nantinya yang akan menempati wilayah Jakarta tak terbatas. Lahan yang dimiliki Jakarta pada tahun 1969 seluas 577 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk Jakarta yang 3.639.465. Penggunaan lahan di

Jakarta yang telah dibangun pemukiman seluas 1.102.297,07 m<sup>2</sup>. Peningkatan penggunaan lahan di Jakarta dipastikan meningkat, hal ini disebabkan karena bertambahnya luas wilayah Jakarta pada tahun 1977 yang menjadi 985.301,89 m<sup>2</sup>, penyebab terjadinya penurunan ini dengan diselenggarakan pemutihan yang dilakukan Pemprov DKI. Hal ini tidak mengurangi banyak penduduk Jakarta yang pada tahun 1977 berjumlah 5.245.765.

Pada tahun 1987 luas tanah Jakarta yang dimiliki Jakarta tentunya bertambah dengan adanya pemekaran kawasan Jakarta yang menjadi 654,82 Km<sup>2</sup>, penduduk Jakarta berjumlah 6.4960.910 dan penduduk membangun pemukiman dengan total luas 33.415,90 m<sup>2</sup>. Pada tahun 1992 luas pemukiman di Jakarta mencapai 27.805,09 ha dengan banyak penduduk Jakarta sebanyak 7.309.389. Pemukiman Jakarta tahun 1997 mengalami peningkatan dengan total luas wilayah 44.462,208 ha, dengan banyaknya penduduk saat itu mencapai 7.712.571.

Kondisi Jakarta yang akan semakin padat secara kependudukan, tetapi hal ini dapat diatasi dengan kebijakan Keluarga Berencana sehingga pertumbuhan masyarakat cenderung stabil. Perkembangan pemukiman tentu akan terjadi, karena perkembangan pemukiman salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan dari kota. Pemukiman Jakarta tentunya mengalami kendala dengan banyaknya perkampung kumuh yang pada akhirnya nanti dilakukan revitalisasi melalui proyek MHT. Dalam teori Doxiadis (1968)

yang melihat pemukiman dengan 5 unsur yaitu, alam (*nature*), bangunan (*shells*), sarana prasarana (*network*) dan manusia (*man*), dan masyarakat (*society*) (Santoso & Therik, 2016). Pelayanan masyarakat yang ideal yang harus ada disebuah pemukiman seperti layanan pendidikan, kesehatan, peibadatan, serta ekonomi. Hal yang diharapkan masyarakat dengan ketersediaan ini mempermudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

#### E. Bidang Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Tarigan (2005), perlindungan sosial dengan tersedianya berbagai fasilitas yang menunjang kebutuhan dasar (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dll) (dalam Normatika, 2018). Hal yang dicapai ialah aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas. Pemprov DKI memberlakukan kebijakan dengan membangun berbagai fasilitas tentunya bertujuan untuk melindungi warganya dari kemiskinan struktural. Dalam hal ini Pemprov melakukan kebijakan dengan pembangunan masal dalam bidang kesehatan, pendidikan serta pusat-pusat ekonomi. Pembangunan dalam sektor kesejahteraan tentunya memiliki dampak yang besar bagi perlindungan masyarakat Jakarta.

Perlindungan terhadap masyarakat Jakarta tentunya masih dalam bentuk fasilitas, bukan dalam bentuk jaminan kesehatan. Penduduk Jakarta yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

militer Indonesia saja yang mendapat jaminan pensiun. Dalam hal ini Pemprov belum menerapkan sistem jaminan sosial dalam rencana pembangunan Jakarta. Perlindungan sosial dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik.

Pemprov DKI tentunya terlihat dalam mengambil keputusan untuk mensejahterakan penduduknya dengan memberikan fasilitas publik. Pembangunan Jakarta yang berorientasi untuk kesejahteraan dengan melakuakn pembangunan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dibangun seperti halnya Rumah Sakit. Rumah Sakit Jakarta mengalami perkembangan dengan cukup signifikan, pada tahun 1966 Rumah Sakit di Jakarta terdapat 22 buah, dengan bertambahnya penduduk Jakarta Rumah Sakit juga mengalami peningkatan menjadi 99 pada tahun 1997. Pada tahun 1966 ruang perawatan Jakarta hanya 4.226, seiring bertambah rumah sakit Jakarta tentu akan berdampak pada bertam,abhnnya ruang perawan yang juga mengalami pertambahan. Pada tahun 1997 Jakarta sudah memiliki kamar perawatan yang berjumlah 15.227. Selalu bertambahnya fasilitas kesehatan Jakarta dapat memenuhi dapat melindungi penduduk Jakarta yang berjumlah 7.712.571 penduduk. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang terdekat pada masyarakat yang dimiliki Jakarta tahun 1969 sebanyak 27 buah, tentunya setiap tahunnya mengalami pertambahan hingga pada tahun 1997 Puskesmas kecamatan ataupun keluarahan sebanyak 442 buah. Hal Melihat pertumbuhan penduduk tentunya Pemprov juga melakukan pertambahan fasilitas

kesehatannya agar dapat menampung penduduk Jakarta.

Fasilitas pendidikan tentunya mengalami pertumbuhan juga, hal ini ditunjukkan untuk mengurangi buta huruf Jakarta. Pemprov melakukan metode pembangunan sekolah untuk dapat menampung peserta didik, dengan banyaknya fasilitas pendidikan akan berdampak pada bertambahnya peserta didik. Pada tahun 1966 banyak sekolah di Jakarta dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Universitas sebanyak 1.557 dan tahun 1997 banyak sekolah menjadi 6.924. Melihat perkembangan sekolah yang bertumbuh tentunya peserta didik juga mengalami peningkatan pada tahun 1966 sebanyak 484.029 dan ditahun 1997 peserta didik mencapai 1.654.041. Melihat perkembangan Jakarta dalam bidang pendidikan tentunya akan berhasil dengan dukungan tenaga pendidik Jakarta ditahun 1966 sebanyak 10.785, tenaga pendidik pada tahun 1997 berkembang mencapai 88.710.

Melihat pola perkembangan Jakarta yang signifikan dalam pembangunan dengan diikuti partisipasi publik. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan (*needs*) akan keselamatan serta rasa aman (*safety and security needs*). Hal ini penting untuk penduduk Jakarta untuk mencapai kesejahteraan di perlukannya perlindungan kesehatan, pendidikan serta ketersediaan lapangan kerja.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan kesejahteraan Jakarta selama periode 1966-1997 menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang terjadi memperlihatkan kesejahteraan yang

menjadi lebih baik. Perkembangan kesejahteraan Jakarta tentunya terlihat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pemukiman serta jaminan sosial. Kelima aspek ini menjadi sebuah indikator dalam peningkatan kesejahteraan Jakarta dalam periode 1966-1997, dengan banyaknya penduduk Jakarta pada tahun 1966 berjumlah 3.639.465 dan pada tahun 1997 penduduk Jakarta berjumlah 7.712.571.

Perkembangan kesejahteraan yang terjadi di Jakarta dalam bidang pendidikan terlihat pada meningkatnya fasilitas sekolah yang bertambah, anak yang telah sadar akan pendidikan, dan berprofesi menjadi seorang guru. Banyak sekolah yang sudah berhasil di bangun selama periode 1966-1997 Pemprov berhasil membangun sebanyak 6.924 sekolah, dengan banyak murid 1.654.041, dan banyak tenaga pengajar sebanyak 88.710. Bidang kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan seperti banyaknya fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas, Rumah Sakit yang telah dibangun sebanyak 99 buah dan Puskesmas yang telah dibangun berjumlah 442. Ketersediaan ruangan rawat menjadi hal yang penting dalam kesehatan yang dimana ketersediaan fasilitas kesehatan, ruangan rawat yang tersedia di Jakarta sebanyak 15.227. Kebijakan KB sebagai aspek kesehatan yang dimana dapat mengatur tingkat kelahiran, penerapannya dengan banyaknya penduduk perempuan Jakarta 3.694.971 dan penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 317.896.

Bidang ketenagakerjaan pada tahun 1971 Jakarta memiliki angkatan kerja berjumlah 3.833.779 penduduk yang sudah memiliki

pekerjaan 3.646.285 dan penduduk yang belum memiliki pekerjaan sebanyak 402.754 penduduk. Penduduk Jakarta didominasi bekerja dalam bidang kemasyarakatan, perdagangan, dan industri. Bentuk jaminan sosial yang diterapkan oleh Pemprov sendiri dengan membangun fasilitas yang berhubungan dengan peningkatan pokok kesejahteraan. Hal yang menyangkut kesejahteraan seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kesetersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan yang dimaksud ialah fasilitas yang disediakan oleh Pemprov.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Martini, S., & Yanuardi, M. H. (2023). Kota Bekasi: Suatu Analisis Pertumbuhan Ekonomi. 12(1), 48–71.
- Adi, I. R. (2018). Kesejahteraan sosial: pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan. PT Rajagrafindo Persada.
- Conway, E. (2015). 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui. In Teori -Teori Kependudukan. Esensi Erlangga Group.
- Edi, S. (1986). Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980. xiii, 186 p. :
- Hilman, I. (2008). Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin Di Jakarta Tahun 1969-1979. Universitas Indonesia.
- Jeklin, A. (2016). Pengaruh Penggunaan Fasilitas Belajar Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik SMA Nugraha Bandung. July, 1–23.
- Jillinek, L. (1995). Seperti Roda Berputar Perubahan Sosial Sebuah Kampung Di Jakarta. LP3ES.
- Karta Hadimadja, R. (1993). Bang Ali: demi Jakarta (1966-1977). Pustaka Sinar Harapan.
- Lukmansyah, N., & Ahmad, T. A. (2016). Pengaruh Pembangunan di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977. Journal of Indonesian History, 5(1), 26–34.
- Mayrudin, Y. M. (2018). Menelusik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto. Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, 4(1), 71–90.
- Normatika, M. (2018). Analisis Kebutuhan Dan Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan Smp/Mts Di Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. 9–32. [http://eprints.undip.ac.id/67697/5/BAB\\_II\\_KAJIAN\\_LITERATUR.pdf](http://eprints.undip.ac.id/67697/5/BAB_II_KAJIAN_LITERATUR.pdf)
- Pohan, M., & Halim, R. (2016). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 16(1), 77–91.
- Puji Ramdani, A. (2009). Gambaran Proses Penanganan Keluhan Pasien di Bagian Front Office Rumah Sakit “BUNGA” Periode Januari - April 2009. Fkm Ui, 1973, 5–35.
- Ricklefs, M. C. R. (2005). Sejarah Indonesia Moderen 1200-2004. Serambi.
- Santos, A. C. Dos. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1986-2013. 17–45.
- Santoso, E. B., & Therik, L. V. (2016). Faktor Penentu Bertempat Tinggal Pada Kawasan Kumuh Di Kota Malang Berdasarkan Teori Doxiadis. Tataloka, 18(4), 261. <https://doi.org/10.14710/tataloka.18.4.261-273>
- Singarimbun, M. (1997). Urbanisasi: apakah itu suatu problema. Prisma.
- Widyanigrum, P. (2013). Peranan Ali Sadikin Dalam Pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977. Universitas Sebelas Maret.